



Kegagalan Coretax Memicu Wacana Publik, Mengikis Kontrak Sosial dan Kepercayaan Wajib Pajak

Martinus Sony Erstiawan*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dinamika, Indonesia

*Penulis korespondensi: martinus@dinamika.ac.id¹

Abstract. The implementation of the core tax administration system (Core Tax Administration System or Coretax) in early 2025, which was expected to modernise tax services, instead sparked a wave of public criticism due to various fatal technical obstacles. The dysfunction of this system not only hampered administration but also gave rise to discourse on distrust of state budget management. This study aims to analyse in depth how the failure to implement Coretax has eroded public trust and damaged the fiscal social contract between taxpayers and the state. The research method uses a qualitative approach with a Critical Discourse Analysis perspective based on Norman Fairclough's model. Data was collected through netnography from public comments and interactions on social media, then analysed through three dimensions: text (micro), discourse practice (meso), and social practice (macro). The findings show that public discourse is not merely technical complaints, but a form of symbolic resistance. At the micro level, system dysfunction is interpreted as evidence of incompetence and alleged budget irregularities. At the meso level, the public mobilises collective memory related to past government project failures to validate their distrust. At the macro level, this signifies a violation of the principle of reciprocity, whereby the state is perceived as demanding tax compliance without providing adequate services, thereby triggering a crisis of legitimacy. The implications of this study emphasise that digital transformation of the public sector requires transparency and accountability; failure to respond to this crisis has the potential to significantly reduce voluntary tax compliance.

Keywords: Coretax; Critical Discourse Analysis; E-Government; Fiscal Social Contract; Public Trust

Abstrak. Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System atau Coretax) pada awal 2025, yang diharapkan memodernisasi layanan perpajakan, justru memicu gelombang kritik publik akibat berbagai kendala teknis yang fatal. Disfungsi sistem ini tidak hanya menghambat administrasi, tetapi juga memunculkan wacana ketidakpercayaan terhadap tata kelola anggaran negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana kegagalan implementasi Coretax mengikis kepercayaan publik dan mencederai kontrak sosial fiskal antara wajib pajak dan negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Norman Fairclough. Data dikumpulkan melalui netnografi dari komentar dan interaksi publik di media sosial, kemudian dianalisis melalui tiga dimensi: teks (mikro), praktik wacana (meso), dan praktik sosial (makro). Temuan penelitian menunjukkan bahwa wacana publik tidak sekadar berisi keluhan teknis, melainkan bentuk resistensi simbolik. Pada level mikro, disfungsi sistem dimaknai sebagai bukti inkompotensi dan dugaan penyimpangan anggaran. Pada level meso, publik memobilisasi memori kolektif terkait kegagalan proyek pemerintah masa lalu untuk memvalidasi ketidakpercayaan mereka. Secara makro, hal ini menandakan pelanggaran prinsip resiprositas, di mana negara dianggap menuntut kepatuhan pajak tanpa memberikan layanan yang layak, sehingga memicu krisis legitimasi. Implikasi studi ini menekankan bahwa transformasi digital sektor publik memerlukan transparansi dan akuntabilitas; kegagalan merespons krisis ini berpotensi menurunkan kepatuhan pajak sukarela secara signifikan.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis; Coretax; E-Government; Kepercayaan Publik; Kontrak Sosial Fiskal

1. LATAR BELAKANG

Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System/Coretax*), yang juga dikenal sebagai SIAP, pada 1 Januari 2025, telah di luncurkan kepada publik yang niat awalnya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak selama proses perpajakan dimulai dari pendaftaran, perhitungan, pelaporan dan pemeriksanaan(Nosi Desnia et al., 2025). Sejak peluncuran Coretax telah memicu gelombang keluhan dan

kekecewaan publik (Wala & Tesalonika, 2024). Meskipun proyek ini telah dipersiapkan selama enam tahun dan menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun, peluncurannya diwarnai berbagai kendala teknis yang signifikan(Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Masalah-masalah yang dilaporkan mencakup kesulitan pendaftaran dan akses, tampilan antarmuka pengguna (UI/UX) yang tidak ramah, keterbatasan kapasitas *bandwidth* yang menyebabkan *browser* gagal dan tidak dapat diandalkan (Pesak, 2025).

Keluhan ini tidak hanya terbatas di alami pada kalangan pengusaha dan pakar pajak, tetapi juga meluas dan bergelombang ruang wacana publik termasuk media sosial sehingga masyarakat mengeluhkan *server error* dan sistem yang belum stabil(M. S. Erstiawan, 2025a). Kekhawatiran utama wajib pajak berdasarkan kendala sistem yang berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dan menghambat proses pelaporan perpajakan. Frasa "Mau Bayar Pajak Kok Dipersulit?" yang muncul di ruang publik secara gamblang mencerminkan dismotivasi dan terdapat ketidak percayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan perpajakan digital yang seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Komisi XI DPR RI sendiri telah berulang kali mempertanyakan dan membicarakan kesiapan sistem ini dalam pertemuan koordinasi dan sehingga pada akhirnya memberikan pernyataan kekecewaan atas ketidaksiapan Coretax dengan jangka waktu persiapan yang panjang serta anggaran yang dikeluarkan besar yang telah dialokasikan(Pramudhiaz & Gunawan, 2025).

Urgensi penelitian ini sangat berasalan guna melihat dampak langsung pada kepatuhan pajak, dengan kegagalan implementasi Coretax, yang dapat berpotensi besar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menghambat proses pelaporan, yang pada gilirannya sangat berdampak pada penerimaan negara(M. S. Erstiawan, 2025b). Pajak yang menjadi tulang punggung negara dan pembangunan nasional memerlukan perhatian lebih oleh negara. Dengan adanya kurangnya kepercayaan publik yang disebabkan keluhan yang meluas menunjukkan adanya ketidakpuasan dan rasa frustasi yang mendalam dikalangan masyarakat terutama yang melakukan proses pencatatan, laporan dan pembayaran pajak dimasyarakat luas(Akhriman et al., 2024; Mudzakir, 2025). Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah terutama dalam perpajakan. Reformasi perpajakan dari Coretax dengan implementasi yang gagal, menuntut evaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah terulangnya kejadian serupa dimasa depan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu, Indonesia sedang gencar mendorong transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan. Dengan adanya kasus Coretax menjadi studi kasus krusial untuk memahami tantangan riil dalam implementasi *e-government* berskala besar dan dampaknya terhadap kontrak sosial antara negara dan warga.

Novelty penelitian ini mencakup adanya ketidak percayaan kontrak sosial terhadap Fiskal yang menjadi tantangan implementasi e-government di Indonesia, penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana kegagalan sistem digital dapat mengikis "kontrak sosial fiskal" atau kesepakatan tidak tertulis dimana setiap warga negara bersedia membayar pajak dengan rasa gotong rotong dan bertanggung jawab antara wajib pajak dan negara. Selanjutnya adanya wacana publik di media sosial dimana penggunaan data komentar di YouTube dan platform media sosial dan lainnya sebagai sumber utama untuk menganalisis wacana publik memberikan perspektif *real time* dan otentik terhadap persepsi masyarakat. Wacana (komentar) yang diperoleh melengkapi yang mengandalkan survei atau wawancara formal karena jumlahnya yang cukup besar memberikan respon.

Tantangan implementasi sekarang ini lebih memprioritaskan ke tata kelola yang didalamnya terdapat transparansi dan efisien dalam pelanan publik. Tantangan akuntabilitas dan pembelajaran dari kegagalan ini menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kegagalan Coretax menuntut evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang begitu besar. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek teknologi informasi pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga implementasi. Jika tidak ditangani dengan baik, kegagalan ini tidak hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah, tetapi juga berpotensi menjadi preseden buruk yang dapat menghambat upaya transformasi digital nasional secara keseluruhan dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah dalam mengelola proyek-proyek strategis di masa depan. Masalah penelitian (*Research Problem*) wacana publik yang muncul di media sosial tidak hanya mencerminkan dan menilai frustasi teknis namun secara tegas menyampaikan delegitimasi otoritas negara yang membingkai kegagalan implementasi Coretax sebagai bukti aplikasi gagal, in kompetensi, adanya korupsi dan ketidakpercayaan wajib pajak (publik). Tujuan penelitian ini menganalisis secara mendalam dampak kegagalan implementasi Coretax dengan mengeksplorasi dan menganalisis wacana publik yang berkembang di media sosial sebagai respon terhadap kegagalan implementasi sistem Coretax. Selanjutnya mengidentifikasi dan memetakan tema dominan dalam keluhan publik. Kekuatan pada penelitian ini membahas mengenai kemampuan memberikan data yang menilai tingkat penerimaan teknologi. Kelemahannya ketidak mampuan mengungkap kompleksitas dan kedalaman emosi, makna sosial dan konteks politik dibalik penolakan publik dengan skala besar.

2. KAJIAN TEORITIS

Coretax merupakan aplikasi modernisasi perpajakan yang didalamnya terdapat input, proses, output (luaran) *storage* dan komunikasi secara *real time*. Menurut Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 tentang pembaharuan sistem administrasi perpajakan (SAP) yang mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel serta akuntabel yang didalamnya terdapat proses bisnis yang efektif dan efisien(Pembaharuan Administrasi Perpajakan, 2018). SAP bertujuan untuk membangun sinergi yang optimal antar lembaga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Kontrak Sosial Fiskal (*Fiscal Social Contract*) yang didalamnya terdapat hubungan antara warga negara (wajib pajak) dan negara sebagai pengambil keputusan dan penyelenggaran perpajakan(Maliki, 2025). Kewajiban negara untuk mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak meliputi infrastruktur, keamanan serta pendidikan. Akuntabilitas dan transparansi terurai dalam penggunaan pendapatan negara dan pengeluaran negara yang digunakan secara bijak dan tidak dikorupsi(Fibrina & Andriani, 2025). Kepercayaan (*trust*) sebagai wajib pajak dengan negara dengan sistem *self assessment system* mulai dari menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan serta membayar pajak. Kepercayaan menciptakan motivasi untuk mendukung perilaku wajib pajak(Abigail & Wijaya, 2025; Valianti et al., 2021). Tata kelola administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk efisiensi dan efektivitas, serta transparansi dalam pelayanan kepada wajib pajak(Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024). Modernisasi sistem administrasi perpajakan diukur dari perubahan besar pada struktur organisasi, sistem pemungutan pajak, selanjutnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang sebelumnya masih dilakukan secara manual(Arum et al., 2025; M. Erstiawan & Binawati, 2023; Hidayatulloh & Fatma, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Norman Fairclough(Dadang Hermawan & Hamdani, 2023; Kurniasari et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam membongkar relasi kuasa, dominasi, dan ketidaksetaraan yang tersembunyi di balik teks(Ehsan et al., 2024). Dalam konteks implementasi Coretax, CDA digunakan untuk menganalisis bagaimana kegagalan sistem secara teknis dikonstruksi menjadi wacana ketidakpercayaan publik dan kurangnya kepercayaan publik antara negara dan wajib pajak. Kerangka kerja Fairclough diterapkan melalui analisis tiga dimensi(Shabbush,

2025), yaitu: (1) Level Mikro (analisis teks) yang meneliti fitur linguistik seperti diksi dan metafora, (2) Level Meso (praktik wacana) dengan melihat dimensi produksi, distribusi, dan konsumsi teks di ruang digital, (3) Level Makro (praktik sosial) yang menghubungkan wacana dengan konteks sosiopolitik yang lebih luas, khususnya terkait kepatuhan pajak dan legitimasi negara.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, dilakukan melalui metode observasi virtual atau netnografi yang berfokus pada interaksi dan wacana di ruang digital. Data penelitian terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer, berupa komentar dan percakapan publik yang dikumpulkan secara sistematis dari platform media sosial utama yaitu YouTube (pada kanal berita/ influencer pajak), X (Twitter), dan Facebook. Pengambilan data difokuskan pada periode pasca peluncuran Coretax pada Januari 2025, dengan menggunakan kata kunci filter seperti "Coretax", "Error DJP", "Sistem Pajak Baru", dan "Kegagalan Coretax". Sedangkan data sekunder berupa dokumen pendukung yang meliputi regulasi resmi (Pembaharuan Administrasi Perpajakan, 2018), siaran pers pemerintah, pemberitaan media massa daring, dan literatur terkait kontrak sosial fiskal.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi digital, di mana data tekstual diarsipkan untuk menjaga keaslian konteks percakapan. Selanjutnya teknik analisis data, berdasarkan data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif (CAQDAS) yaitu MAXQDA dan ATLAS.ti, serta *microsoft excel* untuk kompilasi dan pembersihan data awal yang tidak termasuk dalam kategori. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan (a) Koding dan kategorisasi dengan melakukan koding terbuka (*open coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema dominan dalam keluhan publik, seperti "Disfungsi Sistem", "Dugaan Korupsi/Malpraktik", "Dampak Emosional", dan "Representasi Aktor".

Interpretasi atau analisis terbagi menjadi tiga level antaranya (a) analisis teks dengan mengkaji tata bahasa, kosa kata dan modalitas yang digunakan wajib pajak untuk mengekspresikan rasa frustrasi, (b) analisis praktik wacana dengan melakukan analisis bagaimana intertekstualitas terjadi yang dikaitkan dengan kasus e-KTP dan bagaimana wacana tersebut berkembang melalui interaksi media sosial, (c) analisis praktik sosial dengan menjelaskan implikasi ideologis dari wacana tersebut terhadap hegemoni negara dan kepatuhan pajak. Menguji keabsahan data dengan menjamin validitas dan kredibilitas temuan dimana penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data opini publik di media sosial (perspektif masyarakat) dengan pernyataan resmi pemerintah (perspektif otoritas) dan pemberitaan media massa (perspektif pihak ketiga).

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan meminimalkan bias dalam interpretasi fenomena kegagalan implementasi sistem Coretax.

Tabel 1. Level Mikro.

No	Kategori Utama	Sub Kategori	Kutipan data Representatif
1	Kegagalan dan Disfungsi Sistem	Deskripsi Kinerja Buruk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Loadingnya minta ampun 2. Server sering down 3. Tidak bisa login 4. Hang (muter-muter) terus.
		Fungsionalitas yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa menerbitkan faktur pajak 2. Pekerjaan tidak tersimpan 3. Tidak bisa bikin billing dan susahnya sekali 4. Hasil pdf dari nama pembeli
		Penilaian kualitas total	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasilnya zonk 2. Aplikasi busuk 3. Lebh ruwet ribetnya 4. Aplikasi sampah 5. Programnya abal-abal
2	Kejahatan dan Malpraktik Institusional	Tuduhan Korupsi langsung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dugaan korupsi pengadaan sistem 2. Dana, dibelokin 3. Dana Bocor 4. Sisanya masuk perut
		Kriminalisasi tindakan negara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rampok 2. Rakyat dimodusin lagi buat dirampok 3. Bukan jalan ninja tapi jalan begal
		Tuduhan konspirasi dan niat jahat	<ul style="list-style-type: none"> 4. Snegaja dibikin sulit supaya WP kena sangsi 5. Ada kesengajaan biar sistem ini tidak jalan 6. Sengaja biar nanti ada suntikan dana untuk revisi
3	Dampak penderitaan wajib pajak	Dampak emsional dan psikologis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bikin rakyat geram 2. WP sangat strees 3. Gara-gara coretax asam lambung naik 4. Rasanya mau angis darah
		Dampak ekonomi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha yang rugi 2. Keterlambatan pembayaran invoice 3. Merugikan para pengusaha 4. Investor pada kabur
		Dampak pada waktu dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Banyak waktu terbuang sia-sia 2. Kerjaan terlambat gara-gara coretax 3. Nunggu sampe Belanda menyerang kembali
4	Representasi aktor	Representasi diri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rakyat 2. Masyarakat 3. Kita semua 4. Orang punya duit/aset dikejar-kejar kayak tikus
		Representasi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Pejabat 3. Ciri khas konoha

Resepresentasi Tim IT/Developer	4. Moto DJP terbaru 1. Gwe orang IT sudah tau gaya mereka 2. Yang dapat kerjaan bukan dari profesional, kenalan ordal 3. Deloper dibayar murah
------------------------------------	---

Pada level mikro berdasarkan teks dengan menganalisis fitur linguistik termasuk memilih diksi, metafora, tata bahasa dan struktur kalimat.

Tabel 2. Level Meso.

No	Kategori Utama	Sub Kategori	Kutipan data Representatif
1	Narasi Teks	Wacana dari Posisi Wajib Pajak (Korban) Wacana dari posisi partisipatif Wacana dari posisi pengamat kritis	1. Pihak pengusaha yang rugi karena tidak bisa menerbitkan faktur pajak 2. Gara-gara Coretax asam lambung naik 1. Halah gw orang IT udah tau gaya mereka kalau bikin apps pasti.. yang mahal udah dibelokin 2. Problem utama mereka adalah kkn yang dapat kerjaan bukan yang emang profesional 1. Program Pajak Gonta ganti terus kayak orang ganti kolor 2. Kenapa peralihannya tidak dibuat bertahap.. lah ini grasak – grusuk sekaligus
2	Distribusi dan Interaksi	Validasi Sosial dan pembentukan konsensus Penciptaan slogan dan meme diskursif Evolusi wacana menuju aksi kolektif	1. Presenter ini pintar mewakili WP seluruh Rakyat Indonesia 2. Ini yang dialami kita semua 1. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah 2. Coretax.. coretax.. coresstressss 1. Mari masyarakat sama-sama lapor polisi/KPK 2. Cara buat petisi, usut team developer.. gimana ya? 3. Ayo media usut dong
3	Intertekstualitas	Koneksi dengan sejarah kegagalan nasional Koneksi dengan wacana politik dan figur Koneksi dengan stereotip budaya birokrasi	1. Canggih banget kaya e-KTP 2. Seperti kasus e-KTP, diusut pasti ketemu 3. Enakan jamanku toh?? Kata pak Harto 4. Biar opung luhut ngerti, jangna ngomong masyarakat gk patuh
			1. Budaya mereka kan... kalau ada yang sulit ngapain cari yang mudah?? 2. Sudah bukan rahasia, pemerintah selalu berprinsip kalau bisa dipersulit

Pada level wacana (Level Meso) ini analisis analisis yang dilakukan terhadap proses produksi, distribusi dan konsumsi teks, yang mencakup bagaimana wacana diciptakan, disebarluaskan di media sosial dan diinterpretasikan oleh audiens.

Tabel 3. Level Makro.

No	Kategori Utama	Sub Kategori	Kutipan data Representatif
1	Tantangan terhadap Kuasa	Perlawan Wacana (Discursive Resistance) Pengembalian Relasi Kuasa Simbolis	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah ga ikut cari duit tapi pajak terus nambah2. Situ yang butuh duit, situ yang mempersulit masyarakat1. Ingat anda digaji oleh WP2. Mari masyarakat sama-sama lapor polisi/KPK3. Ayo media usut dong
2	Ideologis	Dominasi Ideologi Anti Korupsi Birokrasi mempersulit Digital Solutionism	<ol style="list-style-type: none">1. Anggarannya sangat fantastis 1,3T, hasilnya Zonk2. Budget yang besar3. Sisanya masuk perut1. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah2. Budaya mereka, kalau ada yang sulit ngapain cari yang mudah1. Digital-digitalan, mau cetak faktur saja tidak bisa2. Proyek swasta mah lancar saja
3	Ketidakpercayaan Wajib Pajak	Pelanggaran pilar Resiprokitas Implimasi pada legitimasi dan moral pajak Krisis legitimasi rasional – legal	<ol style="list-style-type: none">1. Mau bayar pajak saja susah, aneh ya, mau duit tapi mempersulit2. Kita mau bayar pajak dibikin ribet dengan administrasi1. Alhamdullilah ada alasan nggak bayar pajak2. Kalau negara tidak becus ngurusin pajak mending di swastain saja1. Khas Konoha2. Kelola negara sebesar Indonesia, koq seperti RT saja3. Canggih banget kaya e-KTP

Level Makro menghubungkan wacana dengan konteks sosial, politik dan budaya yang secara luas yang diwujudkan berdasarkan hubungan kekuasaan dan ideologi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Level Mikro

Hasil pada level ini terhadap wacana publik mengungkapkan bahwa terdapat kegagalan sistem Coretax yang tidak hanya dipersepsikan sebagai ke data minor, tetapi sebagai sebuah disfungsi total yang diekspresikan melalui makna dan bahasa sebagai informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dan menjadi sebuah gambaran tentang sistem yang tidak hanya gagal tetapi juga secara fundamental tidak layak dipakai.

Kegagalan dan Disfungsi Sistem

Dari hasil olah data yang terurai pada deskripsi kinerja buruk dimana sistem tidak responsif dan tidak dapat diakses mencerminkan keluhan yang paling dasar dan sering muncul secara konsisten dan menggambarkan pengalaman berinteraksi dengan sebuah sistem yang tidak respon dan sulit diakses. Dari kutipan tidak bisa login dan server sering down menunjukkan bahwa masalah ini terjadi diawal interaksi antara pengguna dan saat menggunakan aplikasi bahkan setelah login sebelum masuk menyelesaikan tugas setelah berhasil login. Bagi pengguna kata sering menegaskan frekuensi gangguan sistem tidak hanya insiden sekali, namun bisa berkali-kali. Ujaran tidak bisa login mencerminkan aksesibilitas sebagai titik paling kritis dalam interaksi pengguna dengan sistem. Dari sudut pandang level mikro dalam wacana, struktur kalimat pendek dan ekspresif ini mencerminkan pengalaman langsung dan dialami secara personal, serta menjelaskan bagaimana kegagalan teknis sistem yang diterjemahkan ke dalam bentuk ujaran yang mengandung kritik tajam terhadap aplikasi coretax / penyedia layanan DJP. Ketika sistem gagal memberikan layanan awal, seperti akses masuk, hal ini mengganggu alur kerja pengguna dan menciptakan persepsi bahwa Coretax tidak layak untuk diandalkan dalam konteks kerja yang profesional.

Dari segi fungsionalitas yang tidak lancar terdapat kerusakan krusial pada layanan Coretax. Lebih kepada masalah akses penggunaan. Berdasarkan wacana publik oleh pengguna tersebut merefleksikan kekecewaan mendalam terhadap ketidakmampuan secara fungsional sistem yang menampilkan fitur-fitur penting yang secara teknis menjadi bagian dalam perpajakan termasuk pelaporan, pendaftaran dan lainnya. Selain itu terdapat ungkapan tidak bisa menerbitkan faktur pajak, pekerjaan yang telah dikerjakan tidak tersimpan pada aplikasi coretax, ketidakmampuan membuat billing sampai melihat yang dikerjakan dalam rupa pdf sangat sulit digunakan. Dari uangkapan yang dilontarkan dalam bahasa yang digunakan mengandung ketidakpercayaan dan rasa kecewa, seperti tampak dalam metafora “susahnya setengah mati” yang menggambarkan betapa berat dan menyulitkannya proses yang semestinya otomatis dan efisien. Struktur kalimat sederhana namun sarat makna mengindikasikan bahwa pengalaman langsung saat menggunakan aplikasi mengalami kegagalan dimulai dari fungsi vital sistem perpajakan. Bahkan kesalahan seperti nama pembeli kosong dalam dokumen PDF tidak hanya menjadi kesalahan teknis, tetapi juga menjadi simbol dari ketidakseriusan sistem dalam menjamin validitas dan legalitas data. Secara mikro, uraian ujaran yang disampaikan mengungkap adanya ketidaksesuaian antara janji teknologi

digitalisasi pajak dengan realitas fungsional yang dialami wajib pajak, sehingga memperkuat narasi kerusakan terseistematis yang tidak dapat ditoleransi. Narasi tentang fungsionalitas amburadul ini sangat signifikan karena merubah persepsi masalah dari sekedar ketidaknyamanan menjadi kerugian nyata bagi wajib pajak. Sistem tidak hanya mempersulit kinerja namun juga secara simultan menghambat dan merusak proses kerja.

Dari penilaian kualitas, ujaran masyarakat sebagai puncak dari pengalaman buruk menggunakan aplikasi Coretax mengungkap munculnya bentuk penilaian yang sangat buruk terhadap kualitas keseluruhan sistem Coretax. Kalimat-kalimat seperti “hasilnya zonk”, “aplikasi busuk”, “lebih gila ribetnya”, “aplikasi sampah”, dan “programnya abal-abal” merupakan bentuk wacana yang telah melampaui kritik teknis dan masuk ke dalam wilayah reputasi buruk. Kata-kata tersebut tidak lagi membahas detail masalah, melainkan merupakan bentuk penolakan yang diujarkan secara masif atas keberadaan dan legitimasi sistem. Frasa “aplikasi sampah” dan “abal-abal” menjadi bentuk ujaran cercaan (peyoratif) yang kuat, yang dalam perbincangan publik dapat membentuk opini negatif.

Dalam pendekatan ini, wacana menunjukkan adanya proses delegitimasi secara simbolik di mana publik (wajib pajak) tidak hanya mempertanyakan kapabilitas sistem, tetapi juga niat dan integritas dari penyelenggara sistem tersebut. Bentuk-bentuk ujaran ini memperlihatkan adanya transisi dari ketidakpuasan secara teknis terhadap otoritas digital pemerintah. Di sini, pengguna tidak lagi bersikap sebagai konsumen layanan, tetapi sebagai aktor dalam ruang publik digital yang secara aktif membentuk narasi tentang kegagalan negara dalam menjalankan transformasi digital secara akuntabel khususnya modernisasi aplikasi perpajakan. Selanjutnya Coretax hanya memperburuk masalah yang sudah ada, menjadikan sebuah inovasi yang kontra produktif sehingga terdapat ketidak jelasan kompetensi (inkompetensi) yang patut dipertanyakan dan adanya malpraktik institusional yang dilakukan secara masif sebagai upaya mengurangi pendapatan negara.

Kejahatan dan Malpraktik Institusional

Wacana Kejahatan dan Malpraktik Institusional, pada wacana ini terdapat persepsi adanya kritik tajam terhadap produk yang secara langsung menyerang integritas serta niat baik negara sebagai penyelenggara. Narasi yang dominan dalam wacana publik dari wajib pajak adalah adanya tuduhan korupsi langsung terhadap pengadaan sistem Coretax. Dugaan korupsi pengadaan sistem dihubungkan langsung terhadap kualitas aplikasi yang juga menjadi dasar penyelewengan realisasi anggaran secara masif. Adanya penyimpangan sudah tidak lagi mencerminkan transparansi dan akuntabel, namun seperti bola liar dari wajib pajak yang curiga adanya unsur penyelewengan dana dan telah menjadi tuduhan serta siap dibawa keranah

hukum. Kesan mendalam menandai terjadinya krisis kepercayaan (crisis of trust) terhadap institusi negara khususnya DJP sebagai aktor utama dalam digitalisasi layanan perpajakan. Munculnya frasa rampok, begal, rakyat dimodusin lagi buat dirampok mencerminkan adanya delegitimasi terhadap negara yang dianggap tidak lagi berfungsi sebagai pelindung publik, melainkan aktor yang mengambil keuntungan dari kebingungan dan ketidakmampuan wajib pajak dengan menggunakan modernisasi sistem digital perpajakan.

Di level mikro menunjukkan adanya transformasi persepsi bahwa negara bukan hanya gagal memberikan pelayanan yang layak, tetapi secara aktif melakukan tindakan yang merugikan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh narasi yang menyiratkan unsur kesengajaan dalam kerusakan sistem, misalnya “sengaja dibikin sulit supaya wajib pajak kena sanksi” atau “biar nanti ada suntikan dana revisi”. Framing semacam ini memperlihatkan asumsi publik bahwa kegagalan sistemik bukan sekadar akibat teknis, melainkan strategi terselubung untuk menciptakan kondisi yang rancu dan kemudian dijadikan alasan pembernanan kebijakan atau alokasi anggaran baru. Selanjutnya analisis mikro ini menunjukkan bahwa konteks kegagalan sistem Coretax, kritik masyarakat tidak lagi hanya bersifat kritis terhadap performa teknis, melainkan berkembang menjadi bentuk political resistance terhadap otoritas perpajakan dan tata kelola negara. Ketidakpercayaan publik secara implisit menolak narasi resmi tentang efisiensi digital dan justru menarasikan kegagalan sistem sebagai instrumen kejahatan terstruktur. Selanjutnya adanya narasi adanya konspiratif yang menyiratkan adanya motif ekonomi yang tersembunyi dibalik kegagalan, dimana inefisiensi justru diciptakan untuk membuka peluang proyek dan anggaran baru dimasa depan. Niat jahat ini merupakan puncak kurangnya kepercayaan wajib pajak dimana negara tidak hanya dianggap gagal, namun dianggap menjebak warga negara yang aktif menjadi wajib pajak.

Dampak dan penderitaan wajib pajak

Wacana publik atas kegagalan sistem Coretax tidak hanya berfokus pada aspek teknis, melainkan juga mencerminkan penderitaan wajib pajak dalam tiga dimensi utama, yaitu emosional psikologis, ekonomi bisnis, serta waktu dan produktivitas. Ungkapan seperti “WP sangat stres” dan “asam lambung naik gara-gara Coretax” menandakan tekanan psikologis yang intens akibat kegagalan sistem digital yang seharusnya mempermudah, bukan membebani. Sementara itu, frasa seperti “pengusaha yang rugi” dan “investor pada kabur” menunjukkan bahwa kerusakan sistem juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kelangsungan bisnis. Disfungsi ini menimbulkan ketidakpastian dalam arus kas dan proses administratif yang seharusnya mendukung iklim usaha yang sehat.

Di sisi lain, gangguan terhadap waktu dan produktivitas tercermin dari keluhan publik seperti “kerjaan terlambat gara-gara Coretax” dan “banyak waktu terbuang sia-sia”, menunjukkan dampak sistemik terhadap efisiensi kerja individu maupun lembaga. Ketika sistem digital negara tidak berfungsi optimal, muncul peluang terjadinya resistensi wajib pajak dan penurunan kepercayaan terhadap institusi publik. Oleh karena itu, narasi ini perlu dipahami sebagai indikator krisis legitimasi yang menuntut respons kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pelayanan dan pemulihan relasi negara-warga dalam konteks transformasi digital.

Analisis mikro ini menegaskan bahwa sistem perpajakan digital seperti Coretax bukan sekadar instrumen administratif, tetapi merupakan media berelasi antara negara dan wajib pajak. Ketika kolaborasi ini gagal berfungsi secara adil dan andal, dampaknya tidak terbatas pada dimensi teknis, tetapi meluas menjadi bentuk kegagalan struktural yang menggerus kepercayaan publik terhadap transformasi digital sektor publik. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dan merespons narasi secara menyeluruh, bukan hanya sebagai keluhan teknis, tetapi sebagai sinyal krisis legitimasi dan disfungsi pelayanan publik.

Representasi Aktor

Wacana publik mengenai sistem Coretax memperlihatkan konstruksi representasi aktor yang mengindikasikan relasi antara kuasa dan masyarakat dalam konteks kegagalan layanan digital negara. Identitas kolektif seperti “rakyat”, “masyarakat”, dan “kita semua” menjadi simbol resistensi terhadap sistem yang dianggap tidak memihak. Bahkan pengguna yang patuh pun merasa diperlakukan secara represif, sebagaimana tergambar dalam metafora “dikejar-kejar kayak tikus”, yang menunjukkan ketimpangan relasi antara wajib pajak dan institusi negara. Representasi ini menegaskan bahwa kegagalan sistem bukan sekadar disfungsi teknis, tetapi juga bentuk tekanan struktural yang menciptakan alienasi antara warga dan negara.

Lebih lanjut, representasi pemerintah dan tim teknis turut menjadi sasaran kritik dengan istilah seperti “ciri khas konoha” dan “moto DJP terbaru” menunjukkan pelampiasan ketidakpuasan publik melalui humor politis yang bersifat delegitimatif. Di sisi lain, kecurigaan terhadap integritas tim pengembang, seperti tuduhan perekrutan berdasarkan koneksi dan bukan profesionalisme, memperkuat narasi disfungsi tata kelola proyek digital pemerintah. Secara keseluruhan, dinamika representasi ini menggambarkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam era digital, sekaligus menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses transformasi digital sektor publik.

Level Mezo

Pada aspek narasi produksi teks, suara masyarakat terbagi ke dalam beberapa sudut pandang, pertama, dari posisi wajib pajak sebagai korban, banyak keluhan yang menunjukkan dampak nyata, mulai dari kerugian bisnis karena gagal menerbitkan faktur hingga gangguan kesehatan fisik (stres/asam lambung) akibat tekanan sistem baru. Kedua, muncul pandangan partisipatif dari kalangan yang mengerti teknologi (IT), di mana mereka menaruh curiga bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemilihan pengembang aplikasi yang tidak profesional. Ketiga, pengamat kritis menyoroti ketidaksiapan pemerintah, menilai kebijakan perpajakan terlalu sering berganti dan peluncuran sistem ini dilakukan secara terburu-buru (grasak-grusuk) tanpa transisi yang memadai.

Dalam hal distribusi dan interaksi, terlihat bagaimana keluhan individu berubah menjadi kesepakatan bersama. Adanya validasi sosial di mana masyarakat merasa "senasib sepenanggungan" dan merasa terwakili oleh kritik yang beredar. Kekesalan ini kemudian diolah secara kreatif menjadi slogan dan meme, seperti sindiran klasik "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah" hingga pelesetan nama sistem menjadi "Corestress". Lebih jauh lagi, interaksi ini berevolusi menjadi dorongan untuk melakukan aksi kolektif. Masyarakat tidak lagi hanya mengeluh, tetapi mulai mengajak untuk membuat petisi, meminta media mengusut kasus ini, hingga ancaman untuk melaporkan pengembang sistem ke pihak berwajib seperti KPK.

Terakhir, pada aspek intertekstualitas dimana masyarakat tidak melihat masalah Coretax sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan menghubungkannya dengan ingatan masa lalu dan stereotip yang ada. Ada koneksi kuat dengan sejarah kegagalan nasional, di mana publik langsung menyamakannya dengan kasus korupsi e-KTP dan memunculkan kecurigaan bahwa pola yang sama sedang berulang. Wacana ini juga dikaitkan dengan figur politik, baik sebagai perbandingan pemimpin negara pada jamannya maupun sindiran kepada pejabat saat ini (seperti Luhut Panjaitan). Hal ini mempertegas stereotip budaya birokrasi yang sudah melekat di benak rakyat yaitu pandangan pesimis bahwa pemerintah memang memiliki kebiasaan mempersulit urusan rakyatnya.

Level Makro

Tantangan terhadap pemerintah, dalam aspek ini terlihat adanya keberanian masyarakat untuk membalikkan posisi dominan pemerintah melalui apa yang disebut perlawanan wacana. Warga menolak diam dan menyuarakan kritik tajam bahwa pemerintah, yang sebenarnya "tidak ikut mencari uang", justru terus menambah beban pajak dan mempersulit mereka yang sedang

berusaha taat. Lebih jauh lagi, terjadi upaya pengembalian relasi kuasa, di mana masyarakat dengan tegas mengingatkan para pejabat bahwa gaji mereka sesungguhnya berasal dari uang pajak rakyat (Wajib Pajak). Rasa frustrasi ini memicu keberanian untuk melawan, mulai dari ajakan melibatkan media massa untuk investigasi, hingga seruan kolektif untuk melaporkan masalah ini ke polisi atau KPK sebagai bentuk ketidakpercayaan pada pengelola sistem.

Ideologis, pada tataran ideologis, pandangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kecurigaan mendalam terhadap integritas pengelolaan proyek. Dominasi ideologi anti-korupsi sangat kental terasa; publik menyoroti besarnya anggaran yang fantastis (1,3 Triliun Rupiah) namun hasilnya dinilai "zonk" atau gagal, sehingga memunculkan dugaan bahwa sisa anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi. Selain itu, masyarakat meyakini adanya budaya birokrasi yang sengaja mempersulit, dengan berpegang pada sindiran "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah". Kritik juga diarahkan pada solusi digital pemerintah yang dianggap setengah hati atau "digital-digitalan" saja. Publik membandingkan ketidakmampuan sistem pemerintah (bahkan untuk sekadar cetak faktur) dengan proyek swasta yang biasanya berjalan lancar dan profesional.

Ketidakpercayaan Wajib Pajak, analisis ini juga menunjukkan tanda-tanda runtuhan kepercayaan dasar antara rakyat dan negara atau negasi kontrak sosial. Prinsip timbal balik (resiprositas) dinilai telah dilanggar karena rakyat yang sudah berniat baik untuk menyetor uang (membayar pajak) justru dihambat oleh sistem administrasi yang ribet dan menyusahkan. Kondisi ini berdampak serius pada moral pada wajib pajak, di mana warga merasa mendapatkan "alasan sah" untuk tidak membayar pajak atau bahkan berpikir ekstrem agar urusan pajak diswastakan saja jika negara tidak mampu mengurusnya. Puncaknya adalah krisis legitimasi, di mana wibawa negara jatuh di mata warganya. Pengelolaan negara dianggap amatiran sekelas pengurus RT, disindir dengan sebutan negeri fiksi "Konoha", dan disamakan dengan kegagalan sejarah proyek e-KTP.

Pembahasan

Transformasi Keluhan Teknis Menjadi Resistensi Simbolik (Analisis Mikro)

Berdasarkan analisis pada level mikro, penelitian ini menemukan bahwa wacana publik terkait kegagalan Coretax telah melampaui sekadar keluhan fungsional menjadi bentuk resistensi simbolik terhadap otoritas negara. Penggunaan pilihan kata yang ekstrem oleh wajib pajak, seperti metafora kriminal ("begal", "rampok") dan istilah peyoratif ("sampah", "aplikasi busuk"), mengindikasikan adanya pergeseran persepsi yang fundamental. Kegagalan teknis seperti server down atau bug aplikasi tidak lagi dipandang sebagai ketidaksiapan infrastruktur semata, melainkan dimaknai sebagai indikator inkompotensi dan itikad buruk penyelenggara

negara. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, fenomena kebahasaan ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak menempatkan diri mereka sekadar sebagai pengguna layanan yang kecewa, tetapi sebagai korban dari sistem yang represif. Hal ini menegaskan bahwa dalam implementasi teknologi sektor publik, aspek usability (kegunaan) berkorelasi langsung dengan legitimasi moral institusi; ketika sistem gagal bekerja, kredibilitas negara runtuh seketika dalam narasi teks publik.

Intertekstualitas dan Mobilisasi Memori Kolektif (Analisis Meso)

Pada level meso, temuan penelitian menyoroti bagaimana gagasan yang terstruktur yang gagal di tengah pendistribusian melalui mekanisme intertekstualitas yang kuat. Wacana yang berkembang di media sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan secara aktif dikaitkan oleh masyarakat dengan trauma sejarah kegagalan proyek pemerintah sebelumnya, khususnya kasus korupsi e-KTP. Koneksi ingatan amsyarakat sangat krusial karena mengubah arah wacana dari "perbaikan sistem" menjadi "tuntutan akuntabilitas hukum". Validasi sosial yang terjadi melalui penyebaran meme satir dan komentar seragam menunjukkan terbentuknya solidaritas di antara wajib pajak. Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai ruang publik digital di mana narasi tandingan (counter-narrative) diproduksi untuk melawan klaim efisiensi yang didengungkan pemerintah. Akibatnya, anggaran sebesar Rp. 1,3 triliun yang dialokasikan untuk proyek ini tidak dilihat sebagai investasi modern, melainkan dikonstruksi dalam wacana publik sebagai bukti pemborosan atau potensi penyelewengan, yang semakin memperburuk citra Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Erosi Kontrak Sosial Fiskal dan Krisis Legitimasi (Analisis Makro)

Secara makro, kegagalan implementasi Coretax memberikan implikasi serius terhadap konsep kontrak sosial fiskal (*fiscal social contract*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan sistem Coretax dimaknai publik sebagai pelanggaran sepihak terhadap kontrak tersebut. Negara dianggap menuntut haknya (pajak) secara agresif, namun lalai dalam menunaikan kewajibannya menyediakan sarana administrasi yang layak. Wacana yang mendominasi ruang publik menunjukkan adanya krisis legitimasi rasional legal, di mana negara kehilangan wibawa karena dianggap gagal mengelola tata kelola dasar administrasi. Kondisi ini memperburuk keberlanjutan penerimaan negara, karena kepercayaan (*trust*) yang merupakan variabel utama dalam kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) telah menurun. Wacana "malas bayar pajak" atau "swastanisasi pajak" muncul sebagai sinyal nyata delegitimasi otoritas fiskal.

Implikasi terhadap Tata Kelola e-Government

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur *e-government* dengan menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa kesiapan matang justru menjadi bumerang bagi pemerintah. Kasus Coretax membuktikan bahwa pendekatan *digital solutionism* melikiki keyakinan bahwa teknologi otomatis menyelesaikan masalah birokrasi adalah keliru jika tidak dibarengi dengan transparansi dan keandalan sistem. Wacana publik yang terekam membuktikan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin kritis dan menuntut standar akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, perbaikan sistem Coretax tidak cukup hanya dilakukan pada sisi teknis (IT), tetapi harus disertai dengan strategi komunikasi krisis yang transparan dan pemulihkan kepercayaan publik. Tanpa adanya perbaikan citra dan jaminan keandalan sistem, transformasi digital perpajakan justru akan memicu pembangkangan pajak (*tax resistance*) yang lebih luas, menghambat tujuan utama negara dalam optimalisasi pendapatan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi sistem *Core Tax Administration System* (Coretax) pada Januari 2025 bukan sekadar permasalahan teknis sistem informasi, melainkan telah berubah menjadi krisis kepercayaan yang serius yang mengikis kepercayaan dan kerelaan melakukan pembayaran pajak di Indonesia. Melalui analisis wacana kritis (CDA), penelitian ini menemukan tiga dimensi krusial. Pertama, pada level mikro, wacana publik merepresentasikan kegagalan fungsional sistem sebagai simbol inkompotensi negara, di mana narasi teknis bergeser menjadi narasi penderitaan dan penindasan terhadap wajib pajak. Kedua, pada level meso, terjadi mobilisasi memori kolektif di ruang digital yang mengaitkan kegagalan saat ini dengan trauma korupsi masa lalu (e-KTP), sehingga memperkuat validasi sosial atas ketidakpercayaan terhadap integritas anggaran proyek. Ketiga, pada level makro, fenomena ini menandakan pelanggaran prinsip resiprositas (asas timbal balik) antara negara dan warga serta negara dianggap agresif menuntut hak perpajakan namun gagal menunaikan kewajiban pelayanan dasar. Akibatnya, legitimasi otoritas pajak mengalami delegitimasi, yang berpotensi menurunkan motivasi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan memicu resistensi pajak pasif di kalangan masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada analisis teks dan wacana di media sosial. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kuantitatif guna mengukur seberapa besar korelasi antara persepsi kegagalan sistem digital dengan penurunan realisasi penerimaan pajak secara nominal. Selanjutnya melakukan studi longitudinal untuk melihat apakah perbaikan sistem di kemudian

hari mampu memulihkan kembali kepercayaan publik (*trust recovery*) atau apakah kerusakan kontrak sosial ini bersifat permanen dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Studi kasus bidang keberatan, banding, dan pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*. <https://doi.org/10.61292/shkr.278>
- Akhriman, A. A., Kamaludin, R., Amelia, R. N., Gunardi, G., & Kesumah, P. (2024). Kepercayaan publik terhadap pajak terkikis: Dampak kasus Gayus Tambunan. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik dan Sosial (JAGADDHITA)*, 2(2), 54–62. <https://doi.org/10.58268/jg.v2i2.128>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianingsih, D. (2025). Dampak implementasi Coretax system dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Dadang Hermawan, A., & Hamdani, A. (2023). Critical discourse analysis of Norman Fairclough on online media reporting about the Rohingya refugee crisis. *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 549–557. <https://doi.org/10.36815/matapena.v6i02.3064>
- Ehsan, M., Amin, M. S., & Hameed, S. A. (2024). A critical discourse analysis of Joe Biden's first speech as president in 2020. *Journal of Education and Social Studies*, 5(3), 61–67. <https://doi.org/10.52223/jess.2024.5307>
- Erstiawan, M. S. (2025a). Analisis tantangan dan respon pemangku kepentingan terhadap implementasi sistem Coretax di Indonesia: Analisis content media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Erstiawan, M. S. (2025b). Modernisasi perpajakan Indonesia dengan aplikasi Coretax: Perspektif content analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 1–17. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>
- Fibrina, N. N., & Andriani, S. (2025). Dampak persepsi media sosial terhadap transparansi dan tata kelola dalam pengelolaan pajak pada penerapan Coretax. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 6(1), 58–76. <https://doi.org/10.24929/jafis.v6i1.4321>
- Maliki, M. A. Al. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mudzakir, F. R. (2025). Policy innovation of Coretax in the modernization of the tax administration system: A case study at KPP Pratama Bandung Cicadas. *Dialektika: Perkumpulan Ilmuan Administrasi Negara Indonesia*, 23(2), 412–420.
- Nosi Desnia, Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2025). The implementation of Coretax on corporate taxpayer compliance and efficiency in tax reporting at CV. X. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(3). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i3.18280>

Pembaharuan Administrasi Perpajakan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2018. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pesak, P. J., et al. (2025). Evaluasi Coretax berbasis technology acceptance model: Perspektif aparat pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), 1702–1724.

Pramudhiaz, E. I., & Gunawan, H. (2025, February 10). Rapat hampir 5 jam, DPR dan Ditjen Pajak sepakat pakai Coretax dan sistem lama. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/02/10/rapat-hampir-5-jam-dpr-dan-ditjen-pajak-sepakat-pakai-coretax-dan-sistem-lama>

Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan, apa urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1), 1–8.

Shabbush, M. M. (2025). A critical discourse analysis of UK Prime Minister Keir Starmer's immigration speech. *Faculty of Arts Journal*, 219–239. <https://doi.org/10.36602/faj.2025.n20.24>

Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.